

**ANALISIS REALISASI ANGGARAN BELANJA DINAS SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN***THE ANALYSIS OF BUDGET REALIZATION OF SOCIAL SERVICE OF THE SOUTH MINAHASA REGENCY*

Oleh:

**Kartini A.T Palilingan <sup>1</sup>****Hendrik Manosoh <sup>2</sup>****Lidia M, Mawikere <sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail:

[<sup>1</sup>theresiapalilingan80@gmail.com](mailto:theresiapalilingan80@gmail.com)[<sup>2</sup>hendrikmanosoh@gmail.com](mailto:hendrikmanosoh@gmail.com)[<sup>3</sup>lidiamawikere@unsrat.ac.id](mailto:lidiamawikere@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Upaya dalam mewujudkan *good governance* maka terjadilah reformasi atas pengelolaan keuangan . Pengelolaan keuangan Daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah mendefinisikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Implementasi daerah tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan anggaran dan setiap tahun pemerintah selalu menyiapkan rencana anggaran dan realisasi anggaran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada analisis realisasi anggaran. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah riset lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan criteria efektif dan efisien realisasi anggaran belanja pada dinas social menurut Keputusan menteri dalam negeri no. 690.900-327 Tahun 1996.

**Kata Kunci :** Anggaran, *Good Governence*, efektif, efisien.

**Abstract:** *Efforts in realizing good governance then there was a reform of financial management. Regional financial management in Government Regulation Number 58 of 2005 regarding regional financial management defines the Regional Revenue Budget is the annual financial plan of the regional government which is discussed and agreed upon by the regional government and the DPRD, and determined by regional regulations. Regional implementation is inseparable from the use and utilization of the budget and every year the government always prepares a budget plan and the realization of the budget. This research uses descriptive qualitative method that is research that aims to reveal qualitative information so that it emphasizes more on the analysis of budget realization. In this research the method used is field research namely interviews and documentation. The results of this study indicate the criteria for effective and efficient realization of the budget on social services according to Minister of Domestic Affairs Decree no. 690,900-327 of 1996.*

**Keywords:** Budget, *Good Governenc*, effective, efficient.

**PENDAHULUAN****Latar Belakang**

Pemerintah adalah suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, serta mengatur jalan suatu sistem pemerintahan di suatu negara. Pergantian pemerintahan dari orde baru ke orde reformasi membawa perubahan bagi pemerintah Indonesia. Dengan adanya perubahan tersebut maka di tuntut untuk dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah merupakan kebijakan yang di pandang secara demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintah yang sesungguhnya. Sasongko dan Parulian (2015 : 2) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan. Dalam hal kebutuhan untuk membiayai semua kegiatan yang akan dilakukan dalam meningkatkan daerahnya kebutuhan dana dituangkan dalam penyusunan anggaran belanja.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Mardiasmo (2009 : 132) menyatakan efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Penyusunan anggaran belanja Dinas Sosial Minahasa Selatan menetapkan target capaian kinerja setiap belanja dan juga menetapkan target anggaran belanja, baik dalam konteks program dan kegiatan ataupun dana yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran belanja. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi. Laporan realisasi anggaran juga berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisien dan efektivitas penggunaan anggaran yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dengan periode sebelumnya, yaitu dengan periode tahun 2018 dan tahun 2019.

**Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realisasi anggaran belanja pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan apakah sudah efektif
2. Untuk mengetahui realisasi anggaran belanja pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan apakah sudah efisien.

**TINJAUAN PUSTAKA****Akuntansi Sektor Publik**

Abdul (2014 : 18) menyatakan akuntansi sektor publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lainnya yang sudah diatur dalam hukum.

**Akuntansi Pemerintahan**

(Sujarweni, 2016 : 18) menyatakan akuntansi pemerintah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik. Akuntansi pemerintah adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Sadeli (2015 : 6) menyatakan akuntansi pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau institusional accounting, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya. Akuntansi pemerintah memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan akuntansi bisnis. Berdasarkan tujuan

pemerintah, Mahmudi (2013 : 7) menyebutkan beberapa karakteristik akuntansi pemerintah yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (*income statement*) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Dalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana.
4. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
5. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.

### Anggaran

Bastian (2014 : 191) menyatakan karakteristik anggaran publik terdiri dari anggaran yang dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan, anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun, anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, usulan anggaran yang ditelaah dan disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusunan anggaran, anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

### Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah. Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten dan pemerintah desa, belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.

### Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Keputusan menteri dalam negeri no. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektifitas anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil Perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian antara 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif

**Tabel 1. Rumus Efektivitas**

|  |
|--|
| $\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$ |
|--|

Sumber : Mahsun (2013)

### Efisiensi

Pengukuran efisiensi menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah – rendahnya. Keputusan menteri dalam negeri no. 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut:

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil perbandingan antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil perbandingan antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil perbandingan antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

**Tabel 2. Rumus Efisiensi**

|  |
|--|
| $\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Output} \times 100\%}{\text{Input}}$ |
|--|

Sumber : Mahsun (2013)

### Penelitian Terdahulu

Muryanti (2017) dalam penelitiannya berjudul Analisis Realisasi Anggaran Untuk Menilai Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2011-2015, menyatakan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan sangat efektif, sedangkan tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Wonogiri selama tahun anggaran 2011-2015 dapat dikatakan efisien.

Arifa (2017) dalam penelitiannya berjudul Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesesuaian Penyajian Laporan Terhadap Psap 02 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2015, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis Efektivitas PAD sangat efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Data.

Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa hasil wawancara yang untuk mengetahui lebih jelas tentang Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, visi dan misi Kabupaten Minahasa Selatan, sejarah Kabupaten Minahasa Selatan, struktur organisasi. Data kuantitatif berupa Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2018 dan 2019.

### Sumber Data.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. data yang dikumpulkan dalam penelitian antara lain : Sejarah singkat tempat penelitian, struktur organisasi, dan Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

### Metode dan Proses Analisis Data.

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu dimana data dan informasi yang diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan, dideskripsikan secara kualitatif. langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Tahap pengumpulan data, (2) Tahap pengolahan data, data yang sudah terkumpul di dalam tahap pengumpulan data, kemudian harus diolah kembali, (3) Menganalisis data laporan realisasi anggaran dengan perhitungan tingkat efektivitas dan perhitungan tingkat efisiensi, (4) Penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Analisis Tingkat Efektivitas dan Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja

Tabel dibawah ini merupakan Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan.

**Tabel 3. Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2018-2019**

| Tahun | Target Anggaran Belanja | Realisasi Anggaran Belanja |
|-------|-------------------------|----------------------------|
| 2018  | 4.113.934.904,00        | 3.990.356.693,00           |
| 2019  | 4.500.620.353,00        | 4.500.620.353,00           |

Sumber : Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tabel diatas dapat dilihat bahwa baik yang sudah ditargetkan dan yang direalisasikan mengalami peningkatan ditahun 2019 yaitu target anggaran sebesar Rp.4.500.620.353,00 dan yang di realisasikan sebesar Rp.4.500.620.353,00. Sedangkan di tahun 2018 target anggaran sebesar Rp. 4.113.934.904,00 dan realisasinya sebesar Rp. 3.990.356.693,00.

Dari tabel di atas, akan di hitung tingkat efektivitas anggaran belanja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

**Tabel 4. Perhitungan Tingkat Efektivitas Anggaran Belanja**

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja} \times 100\%}{\text{Target Anggaran Belanja}}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas (2018)} &= \frac{3.990.356.693,00}{4.113.934.904,00} \times 100\% = 96,99\% \\ \text{Efektivitas (2019)} &= \frac{4.500.620.353,00}{4.500.620.353,00} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Sumber : data olahan

**Tabel 5. Realisasi Anggaran Belanja Langsung dan Total Realisasi Anggaran Belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan**

| Tahun | Realisasi Belanja langsung (Rp) | Realisasi Belanja(Rp) |
|-------|---------------------------------|-----------------------|
| 2018  | 2.278.360.000,00                | 3.990.356.693,00      |
| 2019  | 2.591.105.387,00                | 4.500.620.353,00      |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan

Belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tabel diatas dapat dilihat bahwarealisasi belanja langsung pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.278.360.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.990.356.693,00 dan di tahun 2019 realisasi belanja langsung sebesar Rp. 2.591.105.387,00 dan realisasinya sebesar Rp. 4.500.620.353,00.

Dari tabel di atas, akan di hitung tingkat efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

**Tabel 6. Perhitungan Tingkat efisiensi Anggaran Belanja**

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja langsung} \times 100\%}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi (2018)} &= \frac{2.278.360.000,00}{3.990.356.693,00} \times 100\% = 57,09 \\ \text{Efisiensi (2019)} &= \frac{2.591.105.387,00}{4.500.620.353,00} \times 100\% = 57,57 \end{aligned}$$

Sumber : data olahan

## Pembahasan

**Tabel 7. Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2018-2019**

| Tahun | Realisasi Belanja Langsung (Rp) | Realisasi Belanja (Rp) | Tingkat Efisiensi % | Kriteria       |
|-------|---------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 2018  | 2.278.360.000,00                | 3.990.356.693,00       | 57,09 %             | Sangat efisien |
| 2019  | 2.591.105.387,00                | 4.500.620.353,00       | 57,57 %             | Sangat efisien |

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Data Olahan).

Tabel diatas menunjukkan pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 2.278.360.000,00 dan realisasinya sebesar Rp. 3.990.356.693,00 pada data tersebut di hitung tingkat efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan rumus realisasi belanja langsung bahagi realisasi belanja di kali 100% dan pada tahun 2018 hasilnya tingkat efisiensi dari anggaran belanja yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan di dapat sebesar 57,09. Jadi pada hasil yang di dapat di atas sebesar 57,09 % dari sudut pandang tingkat efisien ini bahwa di pandang masuk dalam kriteria sangat efisien karena hasil pencapaian dibawah 60 %.

Pada tabel di atas dapat dilihat juga tahun 2019 realisasi anggaran belanja langsung sebesar Rp.2.591.105.387,00 dan realisasinya sebesar Rp. 4.500.620.353,00 pada data tersebut di hitung tingkat efisiensi anggaran belanja dengan menggunakan rumus realisasi belanja langsung bahagi realisasi belanja di kali 100% dan pada tahun 2019 hasilnya tingkat efisiensi dari anggaran belanja yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan di dapat sebesar 57,57 %. kriteria tingkat. Jadi pada hasil yang di dapat di atas sebesar 57,57 % dari sudut pandang tingkat efisien ini bahwa di pandang masuk dalam kriteria sangat efisien karena hasil pencapaian dibawah 60 %. Jadi secara keseluruhan pada tahun 2018 sampai 2019 hasil yang di dapat yaitu sangat efisien dan dari tahun 2018 sampai 2019, tidak mengalami penurunan.

Pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan perencanaan anggaran sudah tersusun dengan sangat baik sehingga proses pelaksanaan dimana waktu di awal pelaksanaan kegiatan dengan rencana awal sudah sesuai yaitu pelaksanaa kegiatannya tidak terlambat/tepat waktu, juga sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten hal ini yang membuat anggaran belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan menjadi efisien.

## PENUTUP

### Kesimpulan.

1. Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa pengelolaan anggaran belanja di Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan memiliki tingkat kriteria efektivitas dari tahun 2018 sampai 2019 berada dalam kriteria efektif yaitu menurut Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 jika hasil pencapaian antara 90% - 100% maka anggaran belanja dikatakan efektif dan hasil yang di dapat pada tahun 2018 sebesar 96,99 % dan padatahun 2019 sebesar 100%.  
Naik turunya tingkat efektivitas anggaran belanja di sebabkan karena realisasi anggaran yang di capai tidak sesuai dengan target yang di tetapkan. Contohnya belanja bantuan sosial dan belanja air dan listrik karena pada air dan listrik sering berubah - ubah dan tidak konsisten pengeluarannya sehingga apa yang di targetkan tidak sesuai dengan apa yang terealisasikan namun pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan perencanaan anggaran sudah tersusun dengan sangat baik dan realisasi anggaran belanja sesuai dengan apa yang di targetkan.
2. Tingkat atau kriteria efisien Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2018 dan tahun 2019, secara keseluruhan sudah di olah dengan sangat baik, di mana pada Tahun 2018 tingkat efisiensi sebesar 57,09 %, dan tahun 2019 tingkat efisiensi sebesar 57,57 % .menurut Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien, jadi dari hasil yang di dapat anggaran belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan sudah berhasil memenuhi syarat sangat efisiensi yaitu penggunaan dana yang minimum untuk hasil yang maksimum.

### Saran.

1. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti secara lebih mendalam lagi mengenai analisis laporan realisasi anggaran belanja, efektivitas dan efisiensi anggaran belanja dan menambah tahun pengamatan sehingga hasil yang diperoleh lebih dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam melihat efektivitas dan efisiensi anggaran belanja yang dapat mengevaluasi kinerja pemerintah.
2. Tetap mempertahankan tingkat efektivitas dan efisiensi realisasi anggaran belanja Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan serta untuk meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Minahasa Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

- Arifa Naima Khoirul. (2017). Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Dan Kesesuaian Penyajian laporan terhadap PSAP 02 Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten sukoharjo tahun Anggaran 2011-2015. *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri. Surakarta. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/1686/> Di akses pada Tanggal 7 April 2020
- Bastian, Indra. (2014). *Audit sektor publik*. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen kinerja sektor publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi. Yogyakarta.
- Masruri. (2014). *Analisis efektifitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan*. Akademia Permata. Padang.
- Muryanti Kiky. (2017). Analisis realisasi anggaran untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintah daerah kabupaten wonogiri tahun anggaran 2011-2015. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta Research. Volume 6. ISSN 2277-8616 <http://eprints.ums.ac.id/53164/> Di akses pada Tanggal 20 Mei 2020
- Prof. Drs. H. Lili M. Sadeli, M. (2015). *Dasar-dasar akuntansi* (9th ed.). (S. H., Ed.). PT. BUMI Aksara. Jakarta.
- Sasongko Catur, dan Safrid Rumondang Parulian. (2015). *Anggaran*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna. (2015). *Sistem akuntansi*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

